

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pendidikan

2.1.1 Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen secara umum berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen yang sering disebut sebagai POAC (*planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

George R. Terry (dalam Onisimus Amtu, 2021: 5), dikatakan bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Handoko (2020: 8), mendefenisikan manajemen adalah “Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”

Dari penjabaran konsep manajemen di atas, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya manajemen dalam suatu kegiatan agar mampu menghasilkan suatu produk yang bagus dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah maka sangat dibutuhkan konsep penerapan manajemen yang baik dan tercapainya tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki keterampilan dan kepribadian yang baik.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan

Husaini usman (dalam Suarga, 2019: 13), mengemukakan secara ringkas bahwa tujuandan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
- b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- d. Terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan).
- e. Teratasinya masalah mutu pendidikan.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan

Proses pelaksanaan manajemen pendidikan di suatu lembaga pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) dapat kita ketahui dari berbagai indikator, salah satu indikator yang penulis maksud adalah dengan melihat bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan di suatu Sekolah karena salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan manajemen pendidikan adalah dengan terlaksananya penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu sendiri.

Menurut Syaiful Sagala (2020), bahwa adapun Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan, diantaranya yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagiterciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolahharus membuat rencana jangka pendek pada setiap semestermaupun tahunan, karena kegiatannya selalu berubah.

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukanpada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur sumber daya agar hasilyang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin”.

Dari defenisi tersebut perencanaan mengandung beberapa unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil yang ingindicapai, (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Menurut jangkauan waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek (satu minggu, satu bulan, satu semester dan satu tahun), perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat dalam jangka waktu tiga sampai tujuh tahun, dan perencanaan jangka waktu panjang dibuat untuk jangka waktu delapan sampai dua puluh lima tahun. Pembagian waktu ini bersifat kira-kira, dan tiap ahli dapat saja menerima batasan yang berbeda-beda atau berlainan, penanggalan waktu ini dibuat merupakan anjang-ancang atau contoh yang dapat saja dilakukan.

Sebelum membuat perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

a) Menilai situasi dan kondisi saat ini

Merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan sebelum membuat perencanaan. Gambaran objektif dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untukmembuat perencanaan yang strategis yang sesuai dengan visi dan misi sekolah.

b) Merumuskan dan menetapkan situasi-kondisi yang diinginkan
Kondisi ini mempersyaratkan adanya kepala sekolah yang visioner, kepalasekolah yang mampu melihat kedepan, peluang-peluang yang ada, tantangan-tantangan dan cara mengatasinya, serta adanya upaya untuk meraih peluang yang direncanakan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh kepalasekolah.

c) Menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

Langkah ini merupakan langkah yang strategis yang harus dilaksanakan dalam membuat perencanaan. Kebijakan strategis yang dibuat oleh sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan strategi untuk menjalankannya, serta alat evaluasi yang digunakan dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat.

Adapun beberapa tujuan dibuatnya perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, alternatif-alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program-program.
- b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.
- c) Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
- d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
- e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.
- f) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari *mismanagemen* dalam penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

- g) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.

Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga untuk setiap kegiatan, baik secara individu maupun secara kelompok. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan kegagalan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

2. Pengorganisasian(*Organizing*)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian.

Menurut Gorton (dalam Syaiful Sagala 2020), dijelaskan bahwa pengorganisasian adalah “keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan”.

Dalam pengorganisasian, terkandung dua hal pokok yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu:

a. Penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas

Robbins dalam Fattah menyatakan suatu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Dengan demikian,

struktur organisasi pelatihan akan menggambarkan pengelompokan satuan kerja pelatihan.

b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang (otoritas) mengacu pada hal-hal *inheren* (tertanam) dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi. Lebih lanjut dijelaskan Robbins (dalam Fattah 2020), menyatakan bahwa “tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang dalam melakukan fungsinya. Dengan demikian, pengorganisasian dapat kita maknai sebagai suatu proses menentukan sistem dan prosedur kerja sesuai tugas masing-masing. Pembagian wewenang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan pada setiap jenjang dan struktur organisasi untuk dapat berperan meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Adapun asas-asas pengorganisasian sebagaimana dijelaskan Onisimus Amtu (2021), pengorganisasian terdiri dari beberapa asas yaitu:

- a. Asas pembagian tugas
- b. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab
- c. Asas disiplin
- d. Asas kesatuan komando
- e. Asas mengutamakan kepentingan umum
- f. Asas keadilan
- g. Asas inisiatif
- h. Asas kesatuan dan kebersamaan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan dan penyusunan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap individu yang memang memiliki kompetensi, sehingga menciptakan proses kerja sama

dan sebagai usaha demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat ditegaskan disini, bahwa dalam proses pengorganisasian, semua sumber daya organisasi diorganisir dan digerakkan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing individu. Dapat kita pahami bersama bahwa didalam pengorganisasian, sebetulnya sedang berjalan proses kepemimpinan yang membagi tugas dan kewajiban pada setiap bawahan. Penentuan pegawai atau karyawan sesuai kualifikasi dan keterampilannya, penempatan masing-masing orang sesuai kerjanya menunjukkan bahwa seluruh tugas dibagi habis merata. Pengorganisasian fokusnya adalah pada pembagian, koordinasi, pemantauan tugas dan arus informasi yang ada dalam organisasi sekolah.

Jika kita melihat pada dunia pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tentunya tidak hanya satu atau dua orang yang bergelut didalamnya. Akan tetapi dibutuhkan kelompok orang yang mampu bekerja sama dan berkompeten dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian orang-orang tersebut diberi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Pengorganisasian sekolah adalah tingkat kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dan personal lainnya dalam sekolah melakukan semua kegiatan manajerial untuk mewujudkan yang telah direncanakan dengan menentukan sasaran, menentukan struktur tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan menentukan fungsi-fungsi setiap personal sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga terlaksananya tugas pada berbagai unsur organisasi yang telah ditentukan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen pendidikan, pelaksanaan(*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, menurut George R. Terry (dalam Prim Masrokam Mutohar 2020), mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota-anggota organisasi tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) atau juga bisa disebut dengan pengendalian merupakan bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan itu sendiri. Dalam berbagai kasus peningkatan mutu pendidikan terdapat kasus masih lemahnya pelaksanaan pengendalian sehingga terjadi berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja organisasi sekolah sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh.

Adapun definisi pengawasan (*Controlling*) menurut Robert J. Mocker (dalam Prim Masrokam Mutohar, 2020) “pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Oteng Sutisna (dalam Syaiful Sagala 2020), bahwa “pengawasan ialah proses dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan yang seharusnya terjadi, jika tidak maka penyesuaian yang perlu dibuatnya”.

Dalam pendidikan, pengawasan adalah proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik yang bersifat materil maupun spiritual. Pengawasan secara mendasar memperhatikan ukuran penampilan nyata terhadap penampilan perencanaan mendeteksi penyebaran secara signifikan antara hasil dan harapan-harapan, dan mengidentifikasi alasan penyebaran ini, dan akhirnya mengambil tindakan perbaikan.

Pengawasan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian dari hasil pengawasan apakah dilakukan perbaikan, pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, sesuai dengan intruksi-intruksi yang dikeluarkan, dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka Malayu S.P. Hasibuan (2018) pelaksanaan fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan oleh manajer atau

Kepala Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar2.1
Tugas Manajer Terhadap Manajemen

P	O	A	C

Sumber: Malayu S.P. Hasibuan (2018)

TM : Top Manager
MM : Middle Manager
LM : Lower Manager

Keterangan:

P = Perencanaan (*Planning*);
O = Pengorganisasian (*Organizing*);
D (A) = Pengarahan (*Directing = actuating*); dan
C = Pengendalian (*Controlling*).

Penjelasan:

- 1) *Top manager* (TM). Tugas-tugasnya (aktivitas-aktivitasnya) lebih banyak pada fungsi *planning*, dan *organizing* dari pada kepada fungsi *directing* dan *controlling*, karena sifat pekerjaannya adalah kerja “pikir” yaitu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengorganisir. Jadi, walaupun TM kelihatan santai sebetulnya dia selalu memikirkan keputusan, kebijakan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan.

2) *Middle manager* (MM), tugasnya (aktivitasnya) terhadap *planning* dan *organizing* seimbang dengan *directing* dan *controlling*, karena kerja pikirnya sama dengan kerja fisiknya. Karena itu MM harus mampu menjabarkan keputusan TM, tetapi harus juga mengerjakan serta menjelaskan kepada LM. MM merupakan manajer dua alam artinya harus bias untuk *planning* dan *organizing* serta dapat pula untuk *directing* dan *controlling*. Jadi, PO=DC.

3) *Lower manager* (LM), tugas dan aktivitasnya lebih banyak pada fungsi “*directing/actuating* dan *controlling* dari pada ke fungsi *planning* dan *organizing*” (DC > PO). Hal disebabkan LM merupakan manajer operasional yang langsung memimpin para pekerja operasional. Keterampilan LM lebih diutamakan kemampuan teknik (spesialisasinya) dari pada kecakapan manajerial.

Dalam prakteknya pembagian fungsi fundamental ini tidak dapat dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer (*top manager, middle manager, dan lower manager*), dalam usaha atau aktivitas-aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus melaksanakan semua fungsi tersebut, hanya skop dan penekanannya yang berbeda-beda. Setiap manajer dalam pelaksanaan tugasnya aktivitasnya, dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melakukan “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian” dengan baik.

2.1.4 Indikator Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mulyasa (2017), bahwa terdapat beberapa indikator manajemen pendidikan yaitu:

1. Perencanaan pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah proses merencanakan dan menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan

2. Pengorganisasian pendidikan

Pengorganisasian pendidikan adalah proses mengorganisir dan mengatur sumber daya pendidikan, seperti guru, siswa, fasilitas, dan anggaran.

3. Pengarahan pendidikan

Pengarahan pendidikan adalah proses memberikan arahan dan bimbingan kepada guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Pengawasan pendidikan

Pengawasan pendidikan adalah proses memantau dan mengevaluasi proses pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai.

5. Evaluasi pendidikan

Evaluasi pendidikan adalah proses mengevaluasi hasil pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai.

2.2 Mutu Pendidikan

2.2.1 Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Sagaf S. Pettalogi (2016), Kata kualitas masuk ke dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *quality*, kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu kata *qualitas* yang masuk dalam bahasa Inggris melalui bahasa Prancis kuno yaitu "*qualite*". Dalam pengertian umum kualitas berarti mempunyai sifat yang baik atau terbaik. Jadi kualitas atau mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Mutu pendidikan diartikan sebagai salah satu kerangka yang dilakukan dalam proses belajar mengajar di setiap lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas manusia yaitu: manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, proaktif, sehat jasmani dan rohani (Zakiah Dradjat, 2018: 29).

Mutu pendidikan menurut Edwards Deming (dalam Armai, 2020: 22) adalah “suatu proses pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus menerus”.

Sedangkan dalam pengertian lain menurut ISO 9000-2000 (dalam Armai 2020: 22) adalah “Sebagai derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan”. Mutu dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai “ukuran baik buruknya suatu benda, kadar, taraf dan derajat kepandaian, kecerdasan atau kualitas”.

Mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin keras. Sumber mutu dalam pendidikan antara lain yaitu sarana gedung yang baik, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian kepada pelajaran peserta didik, kurikulum yang memadai atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut, (Supardi, 2021).

Dalam konteks mutu pendidikan, mutu mengacu pada *input*, *procces*, *out put*, dan dampak. Mutu input dapat dilihat dari beberapa aspek pertama, situasi dan kondisi baik atau tidaknya input sumber daya manusia, seperti pimpinan, guru, siwa, dan lainnya. Kedua, memenuhi atau tidak kriteria input berupa perangkat lunak seperti

peraturan dan struktur organisasi. Ketiga, mutu input yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, misi, dan cita-cita.

Mutu *procces*, pembelajaran mengandung arti kemampuan sumber daya yang ada di sekolah dalam mentransformasikan multi jenis input dan kondisi untuk mencapai nilai tambah bagi peserta didik, seperti nilai kesehatan, keamanan, kedisiplinan, keakraban dan kepuasan. Selanjutnya, *out put* pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler biasanya keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang diraih dan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan beraneka jenis dan bentuk keterampilan yang dilakukan peserta didik.

Menurut Erwin Firdaus, dkk (2021), Manajemen mutu pendidikan adalah sebagai proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terciptanya sebuah pelanggan. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya, agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memberikan layanan yang bermutu.

Menurut Agung Nugroho Catur Saputro, dkk (2022), terdapat 13 karakteristik mutu pendidikan yaitu:

1. Kinerja (*performa*) berkaitan dengan aspek fungsional sekolah seperti kinerja guru saat mengajar, menyiapkan bahan ajar lengkap, pelayanan administratif dan edukatif.
2. Waktu ajar (*timelines*) yaitu sesuai dengan waktu ajar, seperti memulai dan mengakhiri pelajaran yang tepat waktu.
3. Handal (*rehability*) yaitu usia pelayanan bertahan lama, seperti memberipelayanan prima yang bertahan dari tahun ke tahun.
4. Daya tahan (*durability*) yaitu memiliki daya tahan tinggi atau tahanbanting, misalnya meski dalam kondisi krisis sekolah tetap bertahan.

5. Indah (*aesthetics*) memiliki apresiasi keindahan, seperti tenaga pengajarmemberikan media pendidikan yang menarik.
6. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yaitu menjunjung tinggi nilaimoral dan profesionalisme, seperti saling menghormati, demokrasi.
7. Mudah penggunaanya (*easy to use*) yaitu sarana dan prasarana yangdipakai, misalnya aturan-aturan yang mudah diterapkan.
8. Bentuk khusus (*feature*) yaitu keunggulan tertentu, misalnya sekolahunggul dalam hal penguasaan teknologi informasi.
9. Standar tertentu (*conformance to specification*) yaitu memenuhi standartertentu, seperti sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
10. Konsistensi (*consistency*) yaitu ajeg, konstan atau stabil, seperti mutusekolah tidak menurun sejak dulu.
11. Seragam (*uniform*) yaitu seragam tanpa variasi, seperti sekolahmenetapkan aturan tidak membedakan/tidak pandang bulu.
12. Mampu melayani (*serviceability*) yaitu mampu memberikan pelayananprima, seperti sekolah bersedia menerima masukan dengan menyediakankotak saran.
13. Ketepatan (*accuracy*) yaitu ketetpatan dalam pelayanan, seperti mampumemberikan pelayanan sesuai dengan yang diiginkan pelanggan sekolah.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas *input*, proses, *output*, dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu apabila siap di proses. *Proses*

pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAKEM yang efektif. *Output* dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan.

Oleh sebab itu, Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga pendidikan formal yang senantiasa mengalami pergeseran dan perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, maka diupayakan penyempurnaan kualitas lembaga pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Menurut Sudarwan Danim (2021: 90), bahwa adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan adalah:

a. Guru

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan. Kualitas pendidikan, terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar tersebut guru memegang peran yang sangat penting guru adalah kreator proses belajar mengajar. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik dan mampu mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batas-batas norma yang ditegakkan secara konsisten. Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan khususnya di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik yang profesional. Tinggi rendahnya mutu hasil belajar siswa banyak tergantung pada kemampuan mengajar guru.

Apabila gurumemiliki kemampuan mengajar yang baik, maka akan membawa dampakpeningkatan iklim belajar mengajar yang baik.

b. Sarana dan prasarana

Pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Sedangkan dalam keputusan asing, sementara ahli ahli menggunakan istilah *audia visual aids* (AVA) *teaching material*, *instructional material* Para ahli telah mengklasifikasikan alat/media pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda (materi) dan alat pendidikan yang bukan benda (non materil).

- 1) Alat pendidikan yang bersifat materi atau alat pendidikan materil (a). bahan-bahan cetakan atau bacaan, (b). Alat tanpa proyeksi seperti papan tulis dan diagram, (c). Media pendidikan seperti tiga dimensi, (d). Alat pendidikan yang menggunakan tehnik.
- 2) Alat pendidikan yang bukan benda (non materil) Selain alat/media pendidikan berupa benda, terdapat pula alat/media pendidikan yang bukan berupa benda. Diantara alat/media pendidikan yang berupa bukan benda atau non materil adalah (a). Keteladanan, (b). Perintah/larangan, (c). Ganjaran dan hukuman.

c. Kurikulum

Kurikulum “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran”. Rosyada menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah itu harus ideal. Kurikulum harus berbicara tentang keharusan bukan kemungkinan.

d. Proses belajar mengajar (PBM)

Proses belajar mengajar (PBM) suatu kegiatan intraksi antara guru dan murid dimana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Proses pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya intraksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula.

Menurut Husaini (2019), Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadinya peningkatan manajemen mutu pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia sebagai pengelola

Sumber daya manusia sebagai pengelola madrasah atau sekolah terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah

Kepemimpinan di suatu sekolah, dikelola oleh kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pendidik (guru) yang diberi tambahan tugas untuk mengelola dan memimpin suatu lembaga pendidikan formal, yang diangkat berdasarkan tugas dan kewenangannya oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pasal 30 menyebutkan “kepala sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi pendidikan, pembinaan guru dan tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana.

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin atau pemimpin suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.

Kepala sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Guru

Dunia pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru. Peran guru sangat dibutuhkan dalam program pendidikan kita, menjadi seorang guru adalah profesi yang tidak mudah. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Dalam hal ini guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh peserta didiknya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, secara intelektual maupun akhlakunya.

c. Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan diadakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap tenaga kependidikan.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan disini adalah sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan sarana dan prasarana dipergunakan untuk dalam pelaksanaan

pendidikan secara umum maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.

3. Kesiswaan

Urusan bidang kesiswaan adalah suatu tugas dalam lingkungan sekolah yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban peserta didik didalam lingkungan sekolah yang meliputi:

- a. Penerimaan peserta didik baru Peserta didik, menurut ketentuan umum Undang-Undang RI tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta

didik juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan lainnya. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dalam penerimaan peserta didik baru ini dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Kebijakan penerimaan peserta didik,
- 2) Sistem penerimaan peserta didik,
- 3) Kriteria penerimaan peserta didik baru,
- 4) Prosedur penerimaan peserta didik baru, dan
- 5) Problematika penerimaan peserta didik baru.

b. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan merupakan terjemahan dari "*Guidance*" berasal dari kata "*Guide*" yang secara luas bermakna mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), menyampaikan (*to describe*), mendorong (*to motivate*), membantu mewujudkan (*helping to create*), memberi (*to giving*), bersungguh-sungguh (*to commit*), pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis (*democratic performance*). Sehingga bila dirangkai dalam sebuah kalimat konsep bimbingan adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan dan pertimbangan, agar yang diberi bantuan mampu mengelola, mewujudkan apa yang menjadi harapannya.

Adapun *counseling* (penyuluhan) adalah maknanya melingkupi proses (*process*), hubungan (*interaction*), menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien (hubungan kinerja), profesional, nasihat, dan saran. Sehingga *clue* (petunjuk) yang bisa diambil dari definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian *advise* (menasehati) yang *adviseable* (disarankan). Jadi apabila

digabungkan bimbingan dan konseling adalah usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara konselor dan pasiennya dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat profesional agar konselor mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. (Gusman Lesman, 2021).

Bimbingan dan konseling perlu diberikan kepada siswa sekolah karena sebagai individu yang telah berkembang, siswa tidak bisa luput dari tekanan dalam diri dan tuntutan dari lingkungannya. Dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangannya, siswa tidak cukup diberi pengajaran saja, tetapi juga perlu mendapat bantuan yang bersifat individual untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal.

c. Program Kegiatan Peserta Didik dan Ekstra Kurikuler

Ekstrakurikuler menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam sekolah yang telah ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Kegiatan ini disamping dilaksanakan di sekolah, dapat juga dilaksanakan di luar sekolah guna memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan atau kemampuan meningkatkan nilai atau sikap dalam rangka penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum sekolah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk lebih mengkaitkan pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan kondisi sekitar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Lampiran III Nomor 81a Tahun 2013

Tentang Implementasi Kurikulum menyebutkan bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler.

d. Pembiayaan

Reformasi dalam bidang keuangan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersifatotonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengelolaan keuangan yang berasal dari dana publik.

Menurut PP RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pengelolaan Keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan”.

Dalam mengatur keuangan di sekolah diperlukan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri

atas perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam melaksanakan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah pembiayaan pendidikan yang memadai. Sekolah/Madrasah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola secara transparan.

Sebuah sistem pendidikan meniscayakan adanya sebuah evaluasi guna mengontrol kinerja suatu satuan pendidikan, sehingga dengan adanya fungsi kontrol tersebut tingkat efektivitas, produktivitas, berhasil dan gagalnya sistem pendidikan dapat dipantau. Dengan pengawasan yang baik akan membantu keberlangsungan keberhasilan suatu lembaga pendidikan.

2.2.3 Standar Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatis *establish* dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Menurut Dede Rosyada (2021: 26) mengemukakan bahwa, standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Standar produk atau jasa yang ditunjukan dengan: (1) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*; (2) sesuai dengan penggunaan (tujuan), atau *fitness for purpose or use*; (3) produk tanpa cacat atau *zero defect*; (4) sekali benar dan seterusnya atau *right first time, everytime*.
- b. Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan: (1) kepuasan pelanggan atau *customer satisfaction*. Bila produk dan jasa dapat

melebihi harapan pelanggan atau *exceeding customer expectation*;
(2) setia kepada pelanggan atau *delighting the customer*.

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah (2022: 310), memaparkan standar sekolah baik yang bermutu, yaitu:

- a. Administrator dan jajarannya serta guru-guru adalah para profesional yang handal.
- b. Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa.
- c. Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajardengan harapan yang tinggi.
- d. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, mempedulikan, dan terorganisasibaik.
- e. Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervise.
- f. Keterlibatan masyarakat yang tinggi.
- g. Membantu para guru mengembangkan strategi, teknik instruksional danmendorong kerjasama kelompok.
- h. Menyusun jadwal secara terprogram untuk memberikan pelatihan dalam jabatandan seminar untuk seluruh staf.
- i. Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa.
- j. Komunikasi dengan orang tua dan menyediakan waktu cukup untuk dialog.
- k. Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas.
- l. Pelihara staf yang memiliki keseimbangan keterampilan dan kemampuan danmengetahui kekuatan dan kapabilitas khusus dari staf.
- m. Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi terhadap stabilitasorganisasi dan membatasi tingkat *turn-over* (perputaran guru).
- n. Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan mata pelajaran dantingkatan kelas siswa sesuai aturan yang ada.
- o. Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah dalam disiplin, penilaian, kehadiran, pengujian, promosi, dan ingatan.

- p. Kerja sama guru dan orang tua untuk menyediakan dukungan pelayanan dalam pemecahan permasalahan siswa.
- q. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah.

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah (2022: 311), Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus.
- b. Standar isi adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.
- c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prasyarat minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.

- h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan alat penilaian pendidikan.

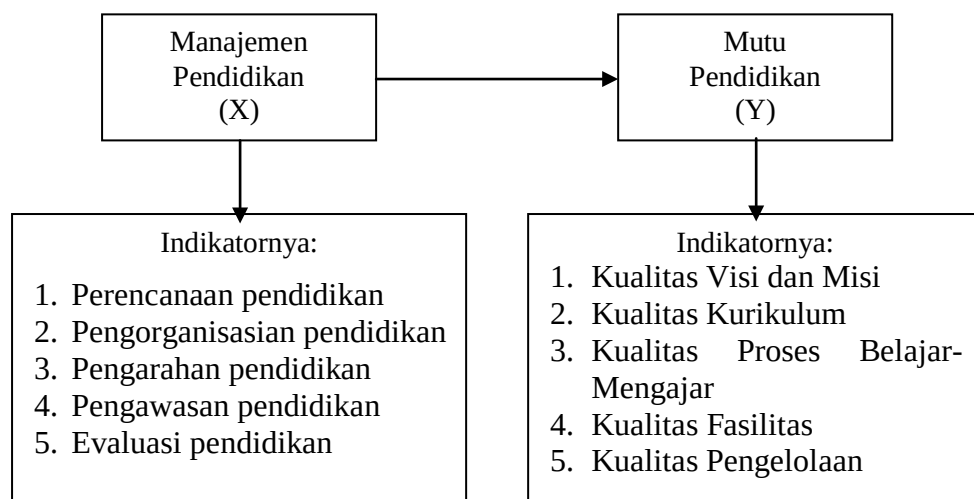
2.2.4 Indikator Mutu Pendidikan

Indikator mutu pendidikan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Indikator mutu pendidikan dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan dari berbagai aspek. Menurut Sergiovani (2013), bahwa ada beberapa indikator mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Kualitas Visi dan Misi adalah seperti kejelasan, relevansi, dan efektivitas.
2. Kualitas Kurikulum seperti relevansi, efektivitas, dan efisiensi.
3. Kualitas Proses Belajar-Mengajar seperti metode pengajaran, evaluasi, dan *feedback*.
4. Kualitas Fasilitas seperti ketersediaan, kualitas, dan keamanan.
5. Kualitas Pengelolaan seperti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti perlu merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:



Sumber: diolah Peneliti (2025)

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Menurut Suryabrata (2017:21), bahwa Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris”. Penerimaan hipotesis terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan asumsi tersebut, maka hipotesis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Ho : Ada pengaruh pengaruh penerapan manajemen pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Satu Atap Idanotae.
- Ha : Tidak ada pengaruh penerapan manajemen pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Satu Atap Idanotae.